

'KOTAK KOSONG' KANDAS BERTARUNG

**2024 Hanya Diakomodasi saat Calon Tunggal,
2029 Jadi Kolom Setuju dan Tidak**

Perjuangan 'kotak kosong' diakomodasi di semua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) --termasuk di wilayah dengan calon lebih dari satu-- kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi atas Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena dianggap kabur dan tidak jelas. Bahkan di pesta semokrasi 2029 nanti daerah dengan calon tunggal surat suaranya menggunakan model plebisit atau memberikan opsi 'setuju' atau 'tidak setuju' pada pemilih. Hal itu termuat dalam putusan MK dalam amar Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024. Gugatan yang diajukan oleh Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya itu dikabulkan sebagian oleh MK. Putusan MK terbaru lainnya terkait Pilkada adalah Pilkada ulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal dinyatakan menang.

Baca Hal 11....

PUTUSAN-PUTUSAN MK

TERBARU SOAL PILKADA

- **Tolak Kotak Kosong di Pilkada**
MK menolak uji materi Pasal 109 UU Pilkada yang mengakomodasi kotak kosong jika ada lebih dari satu pasangan calon. Permohonan dianggap kabur dan tidak jelas.
- **Pilkada Ulang Maksimal Satu Tahun**
MK mengabulkan permohonan agar pilkada ulang dilakukan maksimal satu tahun jika kotak kosong menang pada pilkada calon tunggal, dengan masa jabatan kepala daerah tidak melebihi lima tahun.
- **Surat Suara Calon Tunggal: Setuju atau Tidak**
MK mengubah desain surat suara untuk calon tunggal menjadi model plebisit dengan pilihan 'setuju' atau 'tidak setuju', berlaku mulai Pilkada 2029.
- **Pejabat Daerah & TNI/Polri Sebagai Subjek Hukum Baru**
MK menambahkan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri sebagai subjek hukum baru, dengan hukuman pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 71, yaitu penjara 1-6 bulan atau denda Rp600.000 hingga Rp6 juta.



**Government (Hal.2)
Soal Judol,
Istana Tak Halangi
Pemeriksaan
Budi Arie**

Soal Judol, Istana Tak Halangi Pemeriksaan Budi Arie

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta supaya masalah judi online (judol) dapat diselesaikan. Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Partai Gerindra ini menegaskan istana menyerahkan dugaan keterlibatan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam kasus judol kepada aparat penegak hukum.

Prabowo, kata dia, ingin memberantas judi online dan menegakkan hukum setegaktegaknya. Prabowo pun sudah memberikan arahan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, mengenai penanganan judi online.

"Kalau berkaitan masalah itu (pemeriksaan Budi Arie) semua dikembalikan ke fakta hukum, dikembalikan ke aparat penegak hukum," kata Prasetyo kepada awak media usai pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 November 2024.

Ketua Umum Projo, Budi Arie, menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo pada Juli 2023 hingga Oktober 2024. Belakangan Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online.

Sebelas di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Lembaga ini, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisararis Besar Ade Ary Syam Indradi menyebut pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisararis Besar Wira Satya Triputra menyatakan masih mendalami soal pemanggilan Budi Arie dalam kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. "Nanti akan kami dalam lebih lanjut," ucap Wira.

Budi Arie menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online. Ia mengklaim bahwa dirinya sudah pasti tidak terlibat dengan kasus yang menjerat bekas anak buahnya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu meminta warga menunggu dan membiarkan pendalaman proses hukum untuk



Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Ist

berjalan. Dia ingin fokus koperasi dan mendukung pemberantasan judi online.

"Selalu (siapa kalau diperiksa), kita warga negara," kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (6/11/2024). "Pasti nggak (terlibat)."

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada pegawai Komdigi tersangka kasus mafia akses judi online. Dia mengatakan 10 orang pegawai itu telah diberhentikan.

"10 sudah diberhentikan," kata Meutya di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Meutya mengatakan kasus tersebut saat ini masih terus ditangani Polda Metro Jaya. Dia mengatakan penanganan kasus hukum merupakan wewenang polisi.

"(10 pegawai Komdigi) sudah diberhentikan. Kalau kasus hukum bukan di kami, dari kami itu," katanya.

Meutya mengatakan dirinya sudah melakukan evaluasi internal di Komdigi. Sejumlah SOP di Komdigi saat sedang dikaji ulang.

"Semua SOP-nya lagi kita audit lagi. Yang lama saya nggak komentar dan enggak paham juga, tapi kita lagi audit lagi," jelas Meutya.

Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan penyidikan kasus mafia akses judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Total saat ini sudah 18 orang tersangka ditangkap di kasus tersebut.

"Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Dari 18 orang tersangka itu, Ade Ary merincikan 10 orang adalah

pegawai Komdigi dan 8 lainnya adalah warga yang bukan pegawai Komdigi. Para tersangka ini diduga membuka akses blokir situs judi online. Situs yang blokirnya dibuka kemudian menyetorkan uang ke para tersangka.

Tercatat 8,8 Juta Warga Main Judol

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan ada 8,8 juta warga yang tercatat bermain judi online di 2024 ini.

Mayoritas dari jutaan pemain judi online itu adalah masyarakat bawah dan anak muda.

"Kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 sebanyak 8,8 juta pemain, dimana 80 persen adalah masyarakat bawah dan menasar ke anak-anak muda," kata di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

Judi online menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo untuk ditangani. Terkait hal tersebut, pemerintah sebelumnya membentuk desk penanganan judi online yang dipimpin Kapolri.

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mencatat perputaran uang terkait judi online selama semester II tahun 2024 mencapai Rp283 triliun, naik dari semester I.

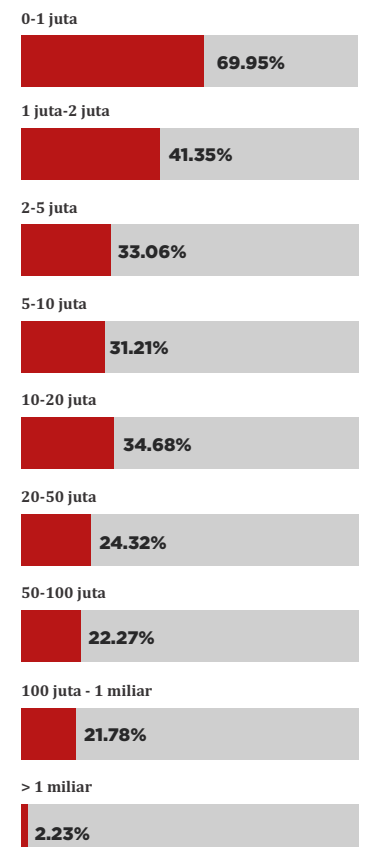
"Per semester I saja sudah menyentuh Rp174 triliun. Saat ini sudah semester II, PPATK melihat sudah mencapai Rp283 triliun," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu. Ivan mengatakan jumlah transaksi di semester I tahun ini melampaui satu tahun penuh di 2022.

Kenaikan tersebut diduga disebabkan oleh perubahan strategi yang dilakukan para bandar. Kini, mereka melakukan transaksi dengan

angka yang lebih kecil tetapi masif.

"Jadi, kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta. Nah, sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," kata Ivan. (din,rls,ist/dya)

PERSENTASE PENGGUNAAN DANA UNTUK JUDI ONLINE DIBANDINGKAN DENGAN PENGHASILAN



SUMBER PPATK, 6 November 2024

DPR Jadwalkan Fit and Proper Test Capim KPK 19-21 November

JAKARTA- Pekan depan atau pada 19-21 November 2024, Komisi III DPR merencanakan agenda uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) KPK.

"Sudah dijadwalkan. Rencananya kalau tidak salah tanggal 19, 20, dan 21. Tapi itu masih ancang-ancang," kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

Namun, kata Nasir, jadwal uji kepatutan dan kelayakan itu bergantung pada surat presiden (surpres). Ia menurutkan sampai saat ini Komisi III DPR belum menerima surpres yang sudah diterima pimpinan DPR.

"Jadi kalau misalnya surpresnya belum ada, ya ditunda lagi. Apakah nanti di akhir masa sidang atau pada masa sidang yang akan datang," ucap dia.

Nasir mengatakan rencananya Komisi III DPR akan meminta masukan dari para pegiat dan organisasi anti korupsi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Dia berhadapan anggota Komisi III bisa menerima masukan terkait rekam jejak nama-nama yang telah diusulkan presiden.

"Mereka diharapkan sebelum fit and proper sudah diterima oleh Komisi III untuk mereka masukkan," katanya.

DPR mengumumkan telah menerima surpres capim dan cadewas KPK periode 2024-2029. Surpres tersebut berisi daftar 20 nama, masing-masing 10 capim dan cadewas KPK yang akan mengikuti uji di DPR.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir memastikan tak ada perubahan nama dari yang telah dikirimkan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Menurut dia, Surpres itu juga sama dengan yang dikirim Jokowi.

"Jadi Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR RI, tidak ada perubahan. Jadi sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya Pak Joko Widodo," katanya.

Adapun 10 nama capim KPK yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyo.

Sedangkan 10 cadewas KPK yakni, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.



(Ilustrasi) Suasana Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. (Dok)

Tugas Berat Menanti

DPR menghargai keputusan Presiden Prabowo Subianto. Anggota DPR Said Abdullah mengatakan DPR telah melakukan pemeriksaan profil dan penelusuran rekam jejak nama-nama yang menjadi calon pimpinan dan Dewas KPK tersebut.

"Pada akhirnya percayalah bahwa DPR dalam hal ini Komisi III akan memilih yang terbaik lewat mekanisme yang ditentukan dengan semangat musyawarah," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta.

Meskipun pimpinan dan Dewas KPK dipilih secara politis (political appointee), namun Said menegaskan bahwa DPR akan menggunakan kewenangannya untuk memilih calon pimpinan dan Dewas KPK secara profesional.

Berbagai fraksi di DPR, kata dia, akan melibatkan kalangan aktivis masyarakat sipil yang selama ini memiliki atensi dan melihat rekam jejak para calon pimpinan dan Dewas KPK.

"Kami akan membuka pintu selebar lebarnya bagi masyarakat luas, akademisi maupun para pegiat antikorupsi untuk memberikan masukan dan data yang penting agar kami di DPR dapat memilih calon pimpinan dan Dewas KPK terbaik yang diajukan oleh Presiden," tutur pria yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran DPR tersebut.

Ia pun mengingatkan bahwa nantinya tugas yang diemban para pimpinan dan Dewas KPK sangat berat lantaran harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, profesional, berintegritas, imparsiial, dan mampu menempatkan hukum sebagai panglima.

Tugas lainnya, sambung dia, yaitu KPK harus mampu memperkuat sistem hukum serta mempengaruhi

presiden dan DPR memperkuat kerja legislasi untuk membenahi sistem hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, dia menambahkan bahwa KPK harus mampu memimpin kerja pemberantasan korupsi dengan jangkauan ke seluruh daerah.

"Setidaknya fokus pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan menciptakan kerugian negara dalam skala besar," ucap Said.

Terakhir, Said menyebutkan tugas berat lainnya yang menanti para pimpinan dan Dewas KPK, yakni menggerakkan KPK sebagai pelopor kepatuhan serta bersama pemerintah dan masyarakat membangun budaya anti korupsi.

Sementara, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan pihaknya akan mendalami akan mendalami persoalan etika dan hukum para capim.

"Kami dari Golkar itu, 2 hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Tandra mengatakan hubungan antara etika dan hukum akan saling berkaitan. Ia menyebut dua unsur tersebut saling melengkapi.

"Kalau hubungan antara etika dan hukum itu begini, di mana etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Ya kan sehingga kapal itu tidak bisa berlayar, kalau tidak ada laut. Kan begitu kan," kata Tandra.

Ia mengatakan bakal mempertimbangkan latar belakang dari Capim dan Cadewas. Tandra tak ingin kejadian pemimpin KPK justru menjadi tersangka korupsi terjadi lagi.

"Nah apa maksudnya saya begitu, kita akan gali latar belakang dari calon-calon baik itu calon pimpinannya, komisioner, maupun

BERIKUT DAFTAR NAMA CAPIM DAN CADEWAS KPK

Capim KPK

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyo

Dewas KPK

1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto



Dewasnya. Dari segi etikanya semuanya harus beres," kata Tandra.

"Baru kemudian kita melangkah lebih jauh ke arah yang persoalan teknis. Kita tidak ingin terulang, di masa periode yang lalu jangan sampai pimpinan KPK kena masalah kan," imbuhnya. (tar,rls,ist/dya)

Gaduh Kasus Ivan Pelaku Intimidasi Anak Sekolah di Surabaya Ditangkap di Bandara Juanda, Rekening Diblokir PPATK

JAKARTA- Pelaku intimidasi atau perundungan ke EN, siswa SMA Kristen (SMAK) Gloria 2, Surabaya bernama Ivan Sugianto resmi ditangkap di Bandara Internasional Juanda. Ia kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus tampaknya bakal melebar, karena Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memblokir rekening pribadi Ivan maupun. Bahkan sejumlah rekening terkait Valhalla Spectaclub Surabaya yang diduga milik Ivan juga diblokir

"Ya (rekening) dia juga kami blokir," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Kamis (14/11/2024).

"Iya (rekening Valhalla Spectaclub diblokir), belasan (rekening), berkembang terus, proses masih jalan," lanjutnya.

Kendati demikian, PPATK belum membeberkan ihwal kasus apa yang melibatkan pengusaha asal Surabaya itu hingga PPATK melakukan pemblokiran rekening.

"Ada terkait beberapa kasus. Masih dalam proses analisis," ucap dia.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan, Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda oleh petugas gabungan kepolisian dan satgas pengamanan bandara.

"Saudara I [Ivan] sudah dinyatakan sebagai tersangka. Dan sekitar 16.00 WIB saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda," kata Dirmanto, di Mapolres Surabaya, Kamis (14/11/2024) sore.

Pantauan di lapangan, saat tiba di Mapolrestabes Surabaya, Ivan tampak digelandang oleh sejumlah penyidik masuk ke gedung Unit PPA dan Jatanras.

Ivan terlihat memakai kemeja putih bergaris. Wajahnya tertutup masker. Tak ada sepeatahkatapun yang ia ucapka.

Dirmanto melanjutkan, Ivan ditetapkan sebagai tersangka setelah Polrestabes Surabaya memeriksa 11 orang saksi dalam perkara ini. Mereka juga sudah melakukan gelar perkara

"Setelah memeriksa 11 saksi tersebut, penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara, dan setelah gelar perkara saudara I sudah ditetapkan tersangka," ucapnya.

Ia belum menjelaskan secara detail pasal apa yang dikenakan kepada pengusaha tempat hiburan malam tersebut. Penyidik masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan.



Ivan Sugianto pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA bersujud dan menggonggong ditangkap di Bandara Juanda, Kamis (14/11/2023). (Humas Polda Jatim)

"Nanti setelah diperiksa tersangkanya ini, baru akan kami update lengkap," pungkasnya.

Sebelumnya, keributan di salah satu sekolah di Surabaya, Jawa Timur, belakangan viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi di SMA Kristen (SMAK) Gloria 2 Surabaya.

Dalam video yang beredar seorang pria dewasa terlihat mengintimidasi salah seorang siswa atau anak di bawah umur. Dia bahkan menyuruh anak itu bersujud dan menggonggong.

Salah seorang sekuriti di SMAK Gloria 2, Kaslan mengatakan, peristiwa itu terjadi Senin (21/10/2024) sore, saat para siswa pulang sekolah.

"Kejadiannya jam 16.00 WIB setelah pulang sekolah," kata Kaslan, Selasa (12/11).

Diketahui, pria dewasa bernama Ivan Sugianto tiba di SMA Kristen Gloria 2 bersama sekelompok orang. Mereka mencari keberadaan seorang siswa berinisial EN.

Ivan disebut tidak terima anaknya, yakni EL, yang bersekolah di SMA Cita Hati Surabaya diejek EN, saat bertanding basket di sebuah mal di Surabaya.

"Saling ejek di lapangan kemudian di [berlanjut] media sosial," ucapnya.

Saat itu, Ivan meminta EN untuk meminta maaf, dengan memaksa bersujud hingga menggonggong. Sejumlah guru, sekuriti bahkan bhabinakantibmas setempat berusaha menengahi.

Atas keributan itu, SMA Kristen Gloria 2, melalui salah seorang gurunya kemudian membawa peristiwa itu ke jalur hukum, Kamis (28/10). Laporan itu diterima dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/1103/XI/2024/SPKT POLESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR.

Cerita Ibu Korban

Terpisah, Ira Maria, ibu dari EN, siswa SMAK Gloria 2 Surabaya, angkat bicara mengenai kronologi intimidasi yang dialami anaknya oleh Ivan Sugianto.

Menurut ibu korban, kejadian intimidasi yang dilakukan oleh Ivan Sugianto ini bermula dari percakapan ringan antar teman.

Hingga akhirnya memicu tindakan intimidatif Ivan Sugianto yang meninggalkan trauma pada EN dan membuat Ira harus dilarikan ke rumah sakit akibat syok.

Ira menjelaskan bahwa anaknya, EN, tidak pernah berniat meng-hina anak Ivan.

EN hanya berkomentar ringan kepada teman-temannya, menyebut rambut anak Ivan terlihat 'lucu seperti pudel' tanpa bermaksud negatif. "Ini hanya candaan biasa di antara teman-teman," ungkap Ira.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada ucapan kasar seperti yang banyak diberitakan. "Jadi kata-kata anj*ng tidak pernah digunakan oleh anak saya," tambahnya. Sayangnya, candaan tersebut memicu reaksi berlebihan dari Ivan.

Sebelum ditahan, Ivan telah menyampaikan permohonan maaf melalui rekaman video atas tindakannya tersebut. Ivan pun menyatakan bakal menyerahkan diri ke polisi.

"Saya Ivan Sugianto sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi," kata Ivan dalam video yang diperoleh kalangan jurnalis di Surabaya, Kamis (14/11/2024) siang. (pra,ist, rls/dya)

KRONOLOGI IVAN SUGIANTO PAKSA SISWA SMA SUJUD DAN MENGGONGGONG

- Peristiwa tersebut diketahui terjadi sejak Oktober 2024, namun baru ramai dibicarakan dan viral usai video Ivan naik pitam tersebar di media sosial. Berikut kronologinya:
- Berdasarkan kronologi yang diungkap, korban merupakan siswa SMA Gloria yang masih berusia di bawah umur berinisial EN (15).
- Kejadian bermula ketika EN bergurau dengan menyebut lawan basketnya yakni anak Ivan Sugianto berinisial EX (15) memiliki rambut seperti poodle.
- Beberapa hari kemudian, EN dan EX bertemu tanpa sengaja di Nextgen Surabaya, disana mereka pertama kali berkenalan. Sejak saat itu, tak pernah tercetus lagi soal kalimat gurauan.
- Namun pada tanggal 21 Oktober 2024, EN mendapat pesan ancaman dari EX untuk memintanya membuat pernyataan bermaterai.
- Mengetahui hal ini, orangtua EN tidak memperbolehkan anaknya menuruti permintaan dari EX.
- Masih di hari yang sama, EX kembali mengancam EN dengan mendatangi sekolah dan kediamannya, namun hal ini tidak direspon oleh korban.
- EN kemudian melaporkan ancaman tersebut kepada orang tuanya, mereka kemudian bergegas menjemput sang anak di sekolah.
- Setelah ayah dari EN datang ke sekolah untuk membalas sang putra, Ivan Sugianto justru datang dengan emosi dan teriak-teriak.
- Kejadian Ivan Sugianto marah-marah dan meminta siswa SMA Gloria sujud dan menggonggong seperti yang beredar di media sosial.

Buntut Kaburnya 7 Tahanan Rutan Salemba Karutan Sedang Cuti, Kini Dinonaktifkan dan Diperiksa

JAKARTA-Beberapa fakta mengejutkan didapatkan Komisi XIII DPR RI saat menggelar sidang di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). Kepala Rutan (Karutan) Salemba Jakarta Pusat Agung Nurbani ternyata tengah cuti saat 7 tahanan kabur pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

"Karutannya nanti kita minta alasannya cuti apa, kapan mengajukan cutinya. Tapi ini, kan, materi pendalaman," ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya kepada wartawan di Rutan Salemba Jakarta Pusat.

Kini, Agung Nurbani sudah dinonaktifkan bersama Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Perumahan (KPLP) Salemba. Saat ini, Agung tengah diperiksa terkait kaburnya 7 tahanan tersebut.

"Tadi kami sudah melakukan rapat dulu dengan pihak Lapas, kebetulan ada Plt Dirjen [Pemasarakatan] Pak Ambeg, ada Plh [Karutan] Salemba Pak Aris, karena [Kepala] Rutan-nya sedang di-off-kan untuk diperiksa oleh pihak Lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal," tutur politikus Partai NasDem itu.

Willy juga mengungkapkan CCTV yang tidak aktif saat peristiwa itu terjadi. 7 orang yang kabur terdiri atas 3 orang narapidana dan 4 tahanan kasus narkoba.

"Ini menjadi benar-benar titik berangkatnya, yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak mulai satu sel ini yang 7 orang," ungkap dia.

"Tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam Panja. Nah yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelum itu," pungkasnya.

Ia juga bakal mendalami terkait apakah ada kelalaian petugas Rutan hingga mengakibatkan kaburnya 7 tahanan tersebut. Termasuk juga perihal standar keamanannya.

"Nanti kita lihat. Sebenarnya kalau bicara SOP-nya, itu, kan, secara fisik bangunannya berbeda dengan bangunan yang lain," tandas dia.

Sebelumnya, terdapat 7 tahanan yang kabur dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024) dini hari. Mereka semua merupakan tahanan terkait kasus narkoba.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar," ujar Kadiv PAS Kanwil Kumham Jakarta, Tony Nainggolan, dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Terpisah, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Otto Hasibuan, mengaku belum mendapat laporan lengkap. Namun ia me-



Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat melakukan sidang di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). (Ist)

astikan akan segera menelusuri masalah ini.

"Nanti akan saya cek kembali. Tapi yang paling utama itu, coba lihat di Menteri Imigrasi (Agus Andrianto)," kata Otto Hasibuan, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Kamis (14/11/2024).

Otto akan mengonfirmasi langsung kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia selaku penanggung jawab.

"Ini konfirmasi masalah di Imigrasi. Coba mungkin tanya kepada Menteri Imigrasi. Detailnya belum

saya dapat," ujarnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) Agus Andrianto membenarkan pihaknya telah menonaktifkan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Narkoba Salemba dan Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Salemba, Jakarta Pusat (Jakpus) buntut kaburnya tahanan gembong narkoba Murtala cs. Kini Kementerian Imipias telah menunjuk Plt Karutan Narkoba Salemba.

"Sekarang sudah ditunjuk Pelaksana Karutan Narkoba dan

KPLP," tegas Agus kepada detikcom, Kamis (14/11/2024).

Agus mengatakan pihaknya juga mendalami ada atau tidak kaitan tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas) Salemba usai peristiwa Murtala cs yang terjadi di Rutan Salemba.

"Masih didalami apakah sampai tanggungjawabnya Kalapas Salemba," jawab Agus saat ditanya perihal kemungkinan Kalapas Salemba juga dievaluasi.

Untuk diketahui, lapas berbeda dengan rutan. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan atau untuk melaksanakan pembinaan terhadap seseorang yang berstatus narapidana.

Sementara rutan tempat bagi tahanan atau seseorang yang masih berstatus tersangka atau terdakwa. Dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, disebutkan rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

"Kalau terindikasi dugaan kelalaian dari hasil evaluasi dan investigasi, ya risikonya diganti," ujar Agus. (wid,rls,ist/dya)

Prabowo Perintahkan Bangun Lapas Maximum Security

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto memberi arahan ke Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto unym membangun lapas dengan maximum security. Untuk apa?

"Presiden memberi arahan agar membangun lapas dengan maximum security," jelas Agus saat silaturahmi dengan pimpinan media di Restoran Plataran Senayan, Kamis (14/11/2023).

Hadir dalam acara silaturahmi ini Wakil Menteri Silmy Karim, Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam, Plt Dirjen Pemasarakatan Ambeg Paramarta, dan Plt Sekjen Kementerian Asep.

Agus lalu menerangkan, pesan Prabowo itu agar lapas dibangun di luar Jakarta. Perintah membangun Lapas itu terkait juga dengan isu-isu miring soal adanya praktik tak sedap seputar Lapas. "Ada tahanan keluar masuk seenaknya," ujar dia.

Namun Agus tak merinci lebih lanjut soal keperluan membangun lapas itu. Pastinya, kementeriannya tengah menyiapkan semuanya.

Namun pembangunan lapas itu juga kuat dugaan terkait perintah Presiden Prabowo untuk melakukan pemberantasan narkoba dan praktik korupsi.

Agus kemudian juga menegaskan, di masa kepemimpinannya, dia akan melakukan pembenahan secara bertahap terhadap praktik-praktik di lapas yang banyak dikeluhkan masyarakat dan diberitakan di media. "Seperti sewa kamar itu," tegas dia.

Sementara, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui adanya persoalan overcapacity atau kelebihan muatan di lembaga pemasarakatan (lapas) di Indonesia. Dia menyebut persoalan itu merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

"Memang masalah overcapacity itu sudah lama sebenarnya, tidak mudah untuk mengatasi persoalan ini," kata Yusril kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Hal itu disampaikan Yusril di tengah peristiwa kaburnya tujuh narapidana kasus narkoba dari Rutan Salemba pada Selasa (12/11/2024) lalu. Baginya, butuh pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengatasi overcapacity di lapas, termasuk lewat revisi Undang-Undang Narkotika.

"Oleh karena berbagai jenis kejahatan itu meningkat sejalan terjadinya perubahan di dalam

masyarakat dan sebanyak apapun LP (lembaga pemasarakatan) kita buat, ya tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri," ucap Yusril. "Karena itu memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," tambah dia.

Lewat beleid tersebut, pengguna narkotika di Tanah Air masih dihukum pidana penjara. Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang dapat diambil pemerintah adalah dengan tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, melainkan merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ungkapnya.

Yusril menuturkan, hingga kini hal itu masih didiskusikan oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi overcapacity lapas yang 50 persen lebih penghuninya berasal dari kasus narkoba. Lebih jauh, Yusril berjanji bahwa pemerintah bakal menyelesaikan masalah tersebut. (Ant,din,rls/dya)

Dana CSR Rp 2 Miliar Digenjot untuk Rombak 6 TPS di Kota Malang

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menggenjot perombakan 6 tempat penampungan sementara (TPS). Pendanaan dikakukan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa perusahaan.

Proyek yang bakal menelan anggaran sekitar Rp 2 miliar ini, ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 mendatang. Bertujuan untuk memperbaiki estetika dan kebersihan TPS, serta mengurangi dampak visual sampah yang sering kali menjadi pemandangan tidak sedap di sejumlah titik kota.

"Hal ini perlu segera dilakukan, supaya masyarakat ataupun pengguna jalan yang lalu lalang melewati TPS, itu tidak melihat sampah-sampah yang berceceran. Dan yang pasti kalau ini sudah terealisasi, maka akan menambah keindahan bagi Kota Malang," ujar Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, Kamis (14/11/2024).

Iwan menjelaskan, setiap TPS yang dipilih akan dirombak untuk memiliki bangunan yang tertutup dan lebih rapi. Dengan begitu, TPS ini tidak hanya

menjadi lebih tertata, tetapi juga dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung program kebersihan Kota Malang.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menambahkan 6 TPS yang akan dirombak yakni TPS di Jalan Kartini, Jalan Wilis, satu TPS di Kelurahan Purwantoro, TPS di Jalan Sulfat, satu TPS di Kelurahan Merjosari, satu TPS di wilayah Kedungkandang, serta TPS di Jalan Ikan Tombro.

"Sebenarnya ada 7. Tapi kan di Muharto itu sifatnya timbunan sampah, tidak ada TPS. Kami lebih mendahulukan wujud TPS nya. Jadi secara karakteristik, sudah punya bak penampungan, tembok pembatas kalau itu TPS, seperti itu," jelas Rahman.

Lebih lanjut, Rahman menyebutkan perombakan 6 TPS ini juga akan disertai dengan penyediaan fasilitas pendukung seperti sumur resapan dan tampungan air lindi. Menurutnya, fasilitas ini bertujuan untuk menampung cairan sampah sehingga tidak mencemari lingkungan



Jajaran pejabat Pemkot Malang saat meninjau TPS di Jalan Ikan Tombro. (Santi/Lenteratoday)

sekitar.

Selain itu, di beberapa TPS yang terletak di jalan-jalan protokol, sambung Rahman, direncanakan akan menerapkan sistem timer untuk pengangkutan sampah agar tidak mengganggu aksesibilitas jalan. "Dengan adanya sistem ini, jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah akan lebih tertib dan tidak menghambat arus lalu lintas di area tersebut," paparnya.

Di sisi lain, Owner PT Ata Asia Putra, Melisa, yang turut berkontribusi

dalam proyek ini, menyatakan pihaknya mendukung penuh program perbaikan TPS, salah satunya yang terletak di di Jalan Ikan Tombro, Kecamatan Lowokwaru.

"Kami memberikan CSR sebesar Rp 400 juta untuk inovasi di TPS Jalan Tombro. Kalau permintaan dari Pemkot Malang, CSR TPS nanti akan dilakukan pengecatan, area tertutup sama pemagaran untuk mengurangi aktivitas pembuangan sampah liar," ungkap Melisa. (Santi/Dya)

Dorong Ekonomi Kerakyatan, Pemkab Malang Perkuat Koperasi Lewat Pendampingan



Salah satu koperasi kredit di Malang. (dok. istimewa)

MALANG - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mengencarkan penguatan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui berbagai program pendampingan dan bimbingan teknis (bimtek), Pemkab Malang berupaya memastikan koperasi-koperasi yang belum aktif atau tidak sehat dapat kembali beroperasi dengan optimal.

Kepala Dinkop-UM Kabupaten Malang, Tito Febrianto, mengungkapkan dari total 1.387 koperasi yang tersebar di Kabupaten Malang, masih terdapat sekitar 300

koperasi yang belum konsisten menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT), salah satu indikator penting dalam penilaian kesehatan koperasi.

"Karena kan koperasi yang dikatakan sehat itu harus mampu melakukan RAT secara rutin selama tiga tahun berturut-turut. Namun, masih ada ratusan koperasi yang belum memenuhi standar ini, sehingga perlu perhatian khusus," ujar Tito, Kamis (14/11/2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tito mengatakan, pihaknya telah merancang berbagai bentuk pendampingan secara langsung. Salah satu program unggulan yang disiapkan yakni program Pendampingan Usaha dan Legalitas (PUAS), yang memungkinkan koperasi mendapatkan bimbingan sesuai keluhan mereka.

"Itu (program PUAS) diluncurkan saat Pak Sanusi belum cuti Pilkada. Jadi masyarakat bisa kontak kami langsung, tinggal kirim surat, sebutkan lokasi, dan siapa saja yang terlibat.

Kami akan datang dan memberikan pendampingan sesuai keluhan," tambahnya.

Salah satu contoh keberhasilan dari implementasi program PUAS terjadi di Kecamatan Wagir. Tito menjelaskan, timnya turun langsung untuk mendampingi sebuah koperasi kecil di wilayah tersebut, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam melaksanakan RAT dan hampir tidak beroperasi.

"Kami turun langsung, memberikan bimtek, monitoring, evaluasi, dan waktu pelaksanaan RAT, saya hadir untuk mendorong mereka agar bisa menjalankan RAT dengan benar. Kami ingin memastikan koperasi tersebut mampu kembali aktif dan berkembang," jelas Tito.

Lebih lanjut, dikatakan Tito, Dinkop-UM Kabupaten Malang juga menjalin kerja sama dengan pihak kecamatan. Menurutnya, para Camat dilibatkan secara langsung untuk mendorong koperasi yang telah memiliki badan hukum tetapi masih mengalami kendala operasional, agar dapat melaksanakan RAT sebagai bentuk akuntabilitas kepada anggotanya.

Di sisi lain, Tito juga mengakui adanya kendala dalam mendata

koperasi yang benar-benar tidak aktif. Seringkali, sambungnya, koperasi yang tidak lagi beroperasi masih tercatat dalam data Dinkop-UM, meskipun secara fisik tidak ada tanda-tanda keberadaannya di lapangan, seperti papan nama atau anggota yang tidak bisa ditemui. (Santi/Dya)



Karena kan koperasi yang dikatakan sehat itu harus mampu melakukan RAT secara rutin selama tiga tahun berturut-turut. Namun, masih ada ratusan koperasi yang belum memenuhi standar ini, sehingga perlu perhatian khusus,"

TITO FEBRIANTO
Kepala Dinkop Usaha Mikro
Kabupaten Malang,

EVAN SOUMILENA, PEMAIN FUTSAL INDONESIA JUARA PIALA AFF FUTSAL 2024

EVAN Soumilena sebagai pemain futsal Indonesia telah banyak mencuri perhatian publik melalui kepiawaiannya dan prestasinya. Terlebih, baru-baru ini, ia juga turut andil dalam kemenangan Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2024.

Dikutip dari laman pssi.org, dalam gelaran 2-10 November tersebut, Timnas Futsal Indonesia berhasil menaklukan seluruh tim lawan, yakni Kamboja (9-0), Australia (3-1), Myanmar (5-1), Thailand (5-1), dan Vietnam (final: 2-0), secara berturut-turut. Dari semua skor kemenangan ini, Evan diketahui mencetak beberapa gol andalan, termasuk di babak semifinal melawan tuan rumah sekaligus juara bertahan selama 9 tahun, yaitu Timnas Futsal Thailand, di babak awal, menit ke-delapan.

PROFIL EVAN SOUMILENA

Berdasarkan profil Evan Soumilena pada laman p2k.stekom.ac.id, pria dengan nama lengkap Holypaul Evan Septinus Soumilena ini tercatat sebagai pemain futsal Indonesia yang bermain untuk klub Liga Futsal Profesional Indonesia, Black Steel Papua.

Karier profesionalnya itu dimulai sejak tahun 2017 bersama klub yang sama, dan mulai bergabung dengan Timnas pada 2022. Selama berlagu,

pemain berposisi pivot ini kerap menunjukkan tendangan keras khususnya, sehingga ia dijuluki "Evanmovic."

Di samping futsal, ia juga merupakan seorang lulusan Bintara Kepolisian di SPN Karombasan, Manado, Polda Sumut. Karena itu, saat ini dirinya aktif bertugas sebagai polisi di Polres Mimika, Papua, sekaligus bermain di Timnas Futsal Indonesia.

PERJALANAN KARIER EVAN SOUMILENA

Selama masa kariernya, pemain andalan Timnas Futsal Indonesia ini pernah menjalani beberapa kali pemindahan atau peminjaman oleh klub. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan perjalanan karier singkat Evan Soumilena:

1. Awal Karier di Black Steel Manokwari (2017)

Nama Evan Soumilena mulai dikenal luas dalam dunia futsal Indonesia sejak bergabung dengan Black Steel Manokwari (saat ini bernama Black Steel Papua) pada tahun 2017. Di klub ini, Evan menunjukkan bakatnya yang luar biasa.

Karena itu, ia menjadi salah satu pemain kunci dan sukses meraih berbagai penghargaan serta trofi bagi klub dan individu. Black Steel

Manokwari menjadi wadah bagi Evan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengukir prestasi.

2. Bergabung dengan Tim Nasional Indonesia (2022)

Keberhasilan di klub mem-bawanya ke panggung internasional bersama Timnas Futsal Indonesia. Laga pertama yang melibatkan kepiawaiannya adalah Kejuaraan Futsal AFF 2022 di Thailand, di mana ia berhasil mencetak 8 gol dari 6 pertandingan.

Sejak itu, Evan tampil dalam berbagai kejuaraan, membawa semangat dan keterampilan yang kuat untuk berkompetisi di tingkat internasional. Partisipasinya di timnas memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemain futsal terbaik di Indonesia.

3. Pindah ke Liga Futsal Portugal (2023)

Pada 22 September 2023, Evan bergabung ke klub "ADCR Caxinas e Porca da Barca" di Liga Futsal Portugal. Namun, kariernya di sana hanya berlangsung sebulan, dan pada Oktober

2023 ia kembali ke Indonesia karena alasan pribadi dan keluarga.

4. Karier di Australia dengan Moreland Blues FC (2024)

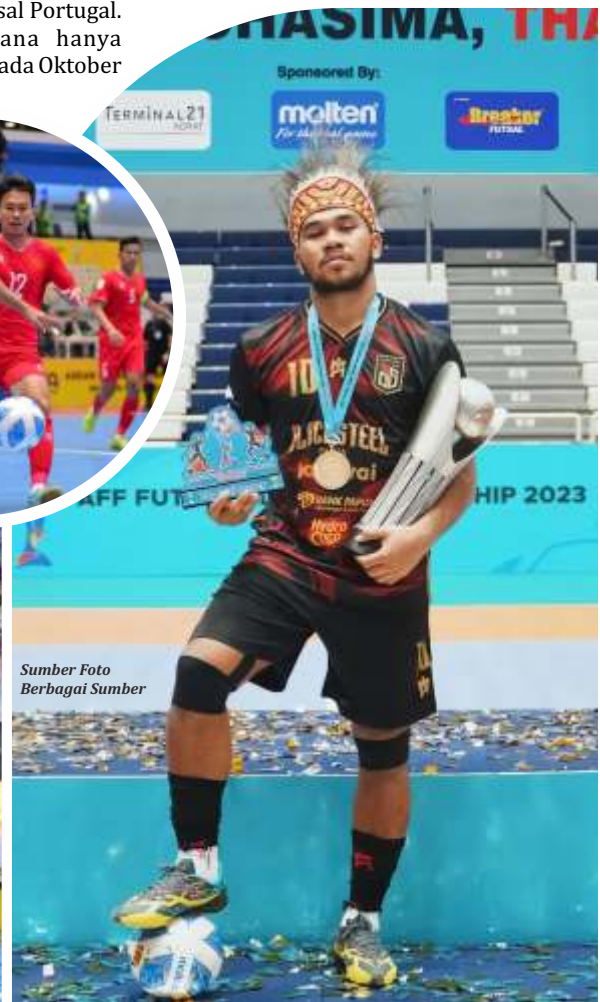
Black Steel Papua, pada Agustus 2024, mengumumkan peminjaman Evan, bersama dua rekan satu timnya, Samuel Amos dan Brian Ick, ke klub Australia, Moreland Blues FC. Ketiganya dijadwalkan untuk bermain hingga akhir musim.

5. Berperan dalam Torehan Juara Piala AFF Futsal (2024)

Setelah sekitar 14 tahun penantian, Indonesia kembali meraih gelar juara Piala AFF Futsal, melalui kemenangan sempurna yang ditorehkan Timnas Futsal Indonesia, yang terdiri dari Evan dan kawan-kawan, merebut gelar juara bertahan dari Timnas Thailand. (nei,ist/dya)



Sumber Foto
Berbagai Sumber



STUDI BARU UNGKAP KAITAN KONSTIPASI DENGAN RISIKO PENYAKIT JANTUNG

STUDI terbaru mengungkapkan adanya hubungan antara konstipasi atau sembelit dengan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular serius, termasuk serangan jantung dan stroke.

Dalam publikasi kesehatan Health pada hari Rabu, tiga penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023 serta informasi dari American Heart Association menunjukkan bahwa sembelit berkaitan dengan risiko lebih tinggi terkena gangguan jantung, terutama pada mereka yang juga memiliki hipertensi.

Bukti yang menunjukkan adanya koneksi antara mikrobioma usus dan kesehatan jantung mendorong para peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana sembelit dapat berperan sebagai faktor risiko.

Salah satu penelitian di tahun 2023 menemukan "hubungan kausal sugestif" antara sembelit dan fibrilasi atrium, yang merupakan jenis aritmia jantung paling umum.

Namun, studi tersebut tidak menemukan kaitan langsung antara sembelit dan gagal jantung, stroke, atau penyakit arteri koroner.

Penelitian lain pada tahun yang sama memberikan hasil berbeda, menyatakan bahwa pasien rumah sakit berusia di atas 60 tahun yang mengalami sembelit dan hipertensi memiliki risiko kejadian kardiovaskular yang lebih tinggi.

Berdasarkan temuan-temuan ini, para ilmuwan semakin tertarik untuk menyelidiki lebih dalam hubungan antara sembelit dan kondisi jantung.

Dalam studi terkini yang dipublikasikan di American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, para peneliti menggunakan data dari lebih dari 400.000 individu berusia 40 hingga 69 tahun dari U.K. Biobank.

Mereka menganalisis catatan medis, riwayat operasi, dan data kematian untuk melihat hubungan antara sembelit dan kejadian jantung seperti gagal jantung, stroke iskemik, atau sindrom koroner akut.

Sembelit didefinisikan sebagai penggunaan obat pencahar secara rutin atau tercatat dalam catatan medis rumah sakit atau kuesioner

untuk sindrom iritasi usus besar.

Setelah menyesuaikan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, penggunaan obat yang berpotensi menyebabkan sembelit, status merokok, dan kondisi kesehatan lain seperti kolesterol tinggi dan diabetes, ditemukan bahwa individu yang mengalami sembelit memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih tinggi untuk mengalami kejadian kardiovaskular serius dibandingkan dengan mereka yang memiliki kebiasaan buang air besar normal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sembelit pada pasien dengan hiper-tensi meningkatkan risiko kejadian jantung sekitar 1,7 kali lipat.

Para peneliti mengidentifikasi sembelit sebagai faktor risiko potensial yang secara independen terkait dengan peningkatan kejadian kardiovaskular serius atau Major Adverse Cardiac Event (MACE).

Sembelit diduga memiliki faktor risiko genetik untuk penyakit kardiovaskular antara 21 hingga 27 persen, yang menurut peneliti dapat menjelaskan hubungan antara keduanya.

Misalnya, genetika dapat memengaruhi sistem saraf otonom, yang berperan dalam mengatur fungsi kardiovaskular dan pencernaan.

Dalam studi lain, teori dikembangkan bahwa mengejan saat buang air besar dapat me-nyebabkan lon-jakan

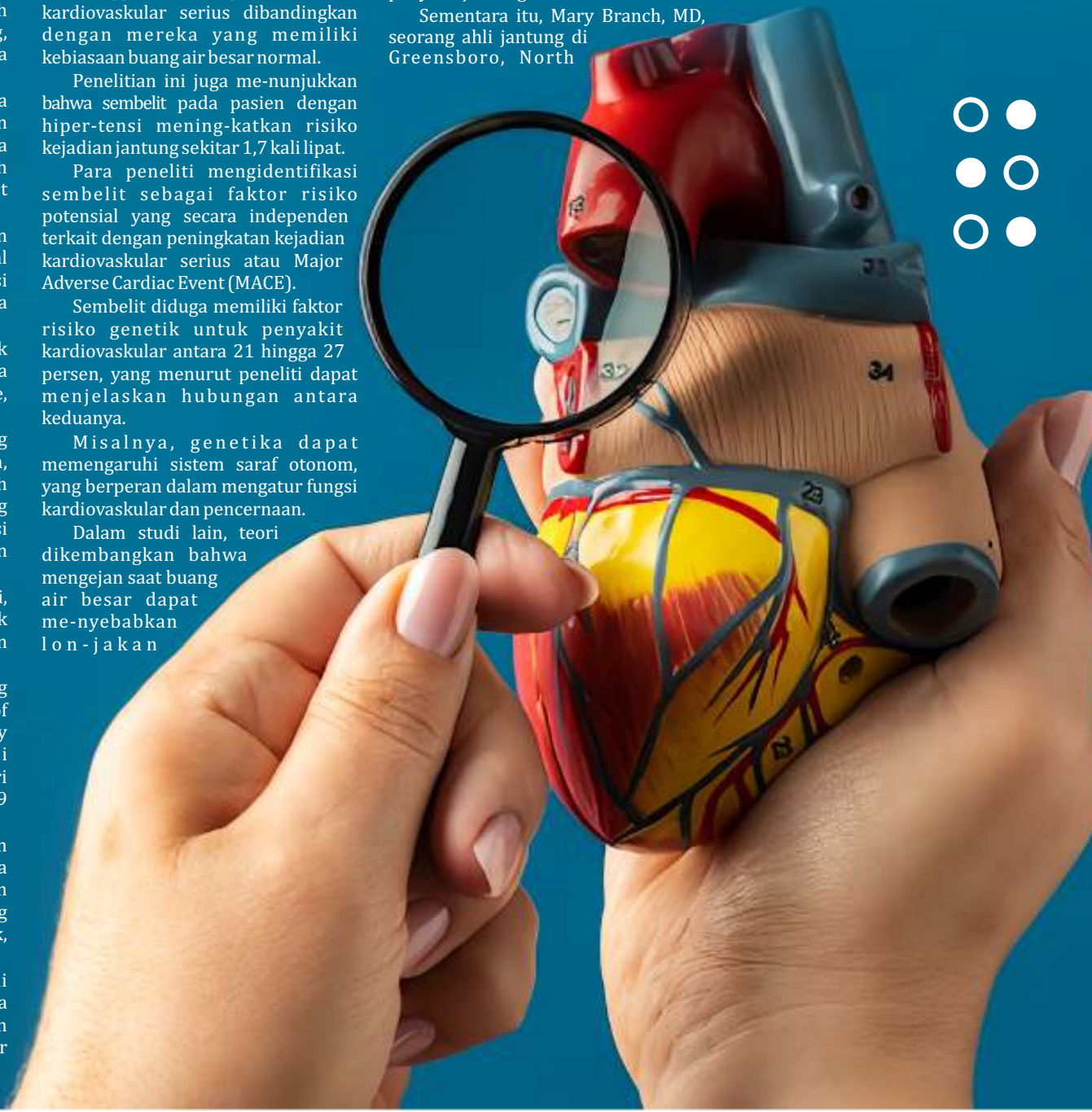
tekanan darah, yang berpotensi memicu kejadian kardiovaskular seiring waktu.

Timothy Ritter, MD, ahli pencernaan sekaligus direktur medis senior di GI Alliance Research, mengungkapkan bahwa individu yang mengalami sembelit mungkin memiliki faktor risiko tambahan yang membuat mereka rentan terhadap penyakit jantung.

Sementara itu, Mary Branch, MD, seorang ahli jantung di Greensboro, North

Carolina, menjelaskan bahwa sifat konstipasi yang sering tidak teratur menyulitkan penilaian menyeluruh mengenai hubungannya dengan kesehatan jantung.

Branch merekomendasikan peningkatan konsumsi makanan berserat untuk membantu fungsi usus sebagai salah satu upaya mencegah risiko penyakit kardiovaskular terkait sembelit. (Lenteratoday)



Inovasi Baru Chery, Konsep Station Wagon dengan Baterai Solid-State

PERKEMBANGAN teknologi kendaraan elektrifikasi terus berlanjut. Inovasi yang mendapat banyak perhatian adalah baterai solid-state. Memungkinkan kendaraan menempuh jarak lebih jauh dibandingkan dengan baterai saat ini. Chery berjanji akan meluncurkan produk ini pada tahun 2026. Namun sekarang, pabrikan Tiongkok ini baru saja memperkenalkan baterai dengan merek Kunpeng.

Chery sedang mengembangkan catu daya solid-state dengan target densitas energi 400 Wh/kg untuk tahun ini. Akan ditingkatkan menjadi 600 Wh/kg pada tahun 2025 dan akan diterapkan pada mobil pertama mereka pada tahun 2026. Produksi awal dimulai pada tahun 2017, dan baterai ini diklaim dapat memberikan jangkauan hingga 1.500 km.

Sebelum menerapkan inovasi ini, Chery memperkenalkan baterai baru bernama Kunpeng, yang terdiri dari tiga seri. Seri pertama baterai lithium iron phosphate berbentuk kotak, diikuti oleh seri kotak berbasis ternary, dan terakhir adalah silinder besar berbasis ternary.

Yang menarik, setiap seri memiliki kemampuan pengisian daya 6C. 'C' merujuk pada tingkat pengisian daya, yang dihitung dengan membagi arus pengisian (A) dengan kapasitas baterai (Ah). Tingkat pengisian yang lebih tinggi berarti baterai dapat diisi atau dikosongkan lebih cepat. Chery mengklaim baterai 6C mereka dapat menambah jarak tempuh hingga 400 km hanya dalam waktu 5 menit.

Mengenai spesifikasi, baterai



lithium iron phosphate yang berbentuk kotak menawarkan densitas energi antara 120-160 Wh/kg, cocok untuk kendaraan listrik (EV) dengan jarak tempuh 200-600 km. Jika diaplikasikan ke Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) atau Electric Range Extender Vehicle (EREV), baterai ini dapat meningkatkan jarak tempuh hingga 100-200 km. Baterai ini juga mendukung pengisian daya pada suhu -30 hingga 65 derajat celsius.

Baterai kotak dengan basis ternary dirancang untuk EV yang memiliki jarak tempuh 600-800 km, dan untuk PHEV serta EREV dengan jarak tempuh listrik penuh 150-300 km. Densitas energinya lebih tinggi, yaitu 140-200 Wh/kg, dan dapat diisi daya pada rentang suhu yang lebih luas, dari -40 hingga 65 derajat celsius. Baterai ini juga fleksibel dengan dukungan pengisian daya dari 2C hingga 6C.

Baterai silinder besar dalam seri

ini ditujukan untuk EV dengan jarak tempuh 700-1200 km, serta PHEV dan EREV dengan jarak tempuh listrik penuh 150-300 km, mendukung pengisian daya dari 2C hingga 6C.

Chery mengungkapkan bahwa baterai Kunpeng dapat bertahan lebih dari 3.000 siklus pengisian. Dilengkapi dengan teknologi desain penyerapan energi multi-seksi, baterai ini mendukung pelepasan tekanan terarah dengan cepat dalam satu detik.

Keunggulan lainnya adalah baterai ini tetap dapat beroperasi meskipun salah satu sudut selnya terpotong. Diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan, seri baterai Kunpeng akan mulai diterapkan ke portofolio produk Chery.

Pamerkan konsep mobil listrik station wagon di Guangzhou Auto Show 2024

Produsen otomotif asal China, Chery dikabarkan akan memamerkan konsep mobil listrik station wagon di

Guangzhou Auto Show 2024 pada tanggal 15 November.

Dilaporkan Carnewschina pada Rabu (13/11/2024) waktu setempat, konsep tersebut kabarnya merupakan pratinjau dari EV berteknologi tinggi yang akan ada di seri mobil Fulwin.

Fitur-fiturnya meliputi platform 800V dan baterai solid-state, bantuan pengemudian L3, dan kokpit cerdas.

Akan ada motor 30.000 rpm, dan mobil akan mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 3 detik dengan kecepatan tertinggi 260 km/jam.

Lebih jauh lagi, mobil ini akan dilengkapi dengan kemudi empat roda dan teknologi steer-by-wire.

Adapun baterai solid-state akan memberikan jarak tempuh hingga 1500 km.

Mobil ini juga akan memiliki suspensi udara bilik ganda dan peredam kejut CDC.

Konsep ini memiliki desain yang sangat agresif. Di bagian depan, terdapat lampu berjalan LED yang khas dan lampu depan tersembunyi.

Terdapat pula kubah panorama, sunroof yang dapat berubah warna, dan kamera tampak samping yang mengalir.

Di bagian belakang, terdapat spoiler aktif dan lampu belakang tembus pandang.

Di bagian dalam, mobil ini memiliki layar infotainment berukuran 15,6 inci, dengan sistem yang ditenagai oleh chip Qualcomm Snapdragon 8295. (nei,ist/dya)



LEGENDA JODOH DI KUIL HIKAWA, KAWAGOE JEPANG

JEPANG adalah negara kepulauan di Asia Timur yang terkenal dengan kekayaan budaya, sejarah panjang, serta teknologi modern. Negara ini memiliki lebih dari 6.800 pulau, tetapi sebagian besar wilayahnya terkonsentrasi di empat pulau utama, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Keempat pulau besar ini mencakup hampir seluruh daratan Jepang dan menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya.

Yang merupakan destinasi wisata mainstream adalah daerah Utara dan Tengah dari pulau Honshu. Kali ini kita akan menjelajah bagian Barat Daya pulau Honshu. Selain destinasi wisata alam, Jepang juga kaya dengan wisata sejarah.

Daerah yang pertama kita kunjungi adalah Kawagoe yang jaraknya sekitar 65 Km dari bandara dengan menggunakan bus.

Kawagoe adalah kota kecil yang terletak di Prefektur Saitama, tidak jauh dari Tokyo, dan sering disebut sebagai "Little Edo" (Koedo) karena mempertahankan suasana zaman Edo (1603-1868) dengan arsitektur bersejarah dan jalanan tradisionalnya. Kota ini menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana kota Jepang klasik tanpa harus jauh-jauh dari ibu kota.

Obyek wisata yang terkenal di Kawagoe adalah kuil Kawagoe Hikawa. Keistimewaan kuil ini memiliki 2.000 lonceng angin warna warni yang memperdengarkan suara indah bila tertiuap angin.

Festival Tanabata atau festival lonceng angin

diadakan setiap tahun. Dimana kita boleh menuliskan keinginan kita pada sebuah kartu lalu disisipkan di bawah lonceng angin.

Festival Tanabata adalah perayaan musim seperti di Tiongkok dan Korea. Dirayakan pada semua kota, termasuk Sendai.

Terdapat lonceng yang berpasangan, melambangkan pasangan suami istri di dalam keluarga. Kuil ini diperkirakan sudah berusia 1500 tahun berfungsi sebagai tempat berdoa untuk memperoleh keberuntungan, kebahagiaan dalam perkawinan dan keluarga. Bila pasangan lonceng ini tertiuap angin, akan menimbulkan suara khas Shinto yang menimbulkan perasaan tenang dan nyaman.

Sebuah legenda mengatakan ambillah kerikil dari halaman kuil, Maka kita akan memperoleh jodoh yang serasi. Para pendeta membagikan kerikil tiap pagi, dan para gadis yang sudah berbaris rapi di depan kuil utama akan membungkus kerikil dengan jaring jerami untuk digunakan secara simbolis sebagai Batu pengikat.

Kuil Kawagoe Hikawa dipersembahkan untuk dewa pernikahan dan dipuja sebagai dewa perjodohan.

Pengunjung khususnya berdoa untuk pernikahan dan keluarga yang bahagia. Festival Kawagoe Hikawa diadakan setiap tahun pada pertengahan Oktober di kuil ini.

Di sebelah kuil terdapat Hikawa Kaijan, yang digunakan sebagai

area pernikahan. Acaranya dikenal dengan nama Nuori no Yui.

Kita juga dapat meramal nasib, istilahnya sama dengan orang Tionghoa, yaitu Ciam Sie. Hanya kalau orang Tionghoa menggunakan bilah kayu, di Jepang menggunakan pancing untuk mengambil kartu ramalan yang berbentukukikan.

Sebelum masuk ke dalam kuil, kita mencuci tangan sebagai simbol membersihkan diri, apalagi bila ingin beribadah. Di pintu masuk terdapat gerbang torii kayu berbentuk Myojin yang terbesar di Jepang dengan tinggi 15 meter.

Salah satu destinasi yang terkenal lainnya, disebut kanal Ema (Ema tunnel), terbuat dari kayu. Sebuah kanal terbuka dengan hiasan 30.000 piring doa terbuat dari kayu, yang disebut Ema. Yang akan menimbulkan melody yang indah. Pengunjung dapat menuliskan kata-kata indah sebagai ucapan terima kasih atau kata-kata bijak pada piring kayu yang disebut Ema ini.

Pengunjung juga bisa membeli pensil merah dan ikan snapper Omikuiji.

Terdapat banyak pohon tua berusia sekitar 600 tahun, pohon Zelkova. Dikenal sebagai pohon suci, bia kita berdoa di depan pohon tersebut dengan membentuk formasi angka 8, maka akan merasakan kekuatan spiritual.

Setelah mengisi perut, kita menuju ke Toki No Kane. Disana terdapat menara lonceng yang sangat terkenal sejak era dinasti Edo. Fungsi dari lonceng ini sebagai penanda waktu bagi kota kastil.

Toki No Kane adalah landmark lain dari kota Kawagoe. Berupa bangunan menara kayu tiga tingkat setinggi 16 meter. Di bagian atas terdapat lonceng. Tetapi kita dapat menikmati suasana kota kuno pada dinasti Edo.

Perjalanan dilanjutkan kembali dengan bus menuju Matsumoto selama 3 jam. Disini kita menyaksikan Kastil Matsumoto atau kastil Fukashi, adalah kastil paling populer tempat bertakhta shogun Tokugawa pada dinasti Edo yang terdapat di kota Matsumoto dekat Kumamoto.

Kastil adalah istana yang dilengkapi pengamanan atau dibentengi dari serangan musuh. Dibangun 430 tahun yang lalu, hampir dirobohkan pada era Meiji, untung dapat diselamatkan dan kini dilestarikan.

Setelah makan malam, barulah kita menuju hotel. Beristirahat agar tubuh tetap bugar guna menyongsong agenda perjalanan hari berikutnya. (nei,ist/dya)



'Kotak Kosong' ... (dari Hal 1)

SEKITAR 2 pekan menjelang Pilkada serentak 2024, berbagai keputusan penting diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Wacana kotak kosong tidak hanya untuk pemilu yang diikuti calon tunggal ditolak oleh MK.

MK resmi menolak permohonan uji materi atas Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang berusaha mengakomodasi "kotak kosong" meski ada lebih dari satu pasangan calon. Menurut MK, permohonan perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024 ini dianggap kabur dan tidak jelas.

"Mahkamah berpendapat, oleh karena posita dan petitum para Pemohon, norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscur), ujar Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dalam sidang putusan, di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Para Pemohon, yang merupakan tiga warga Jakarta, mengajukan uji materi agar pilihan kotak kosong juga diberlakukan pada pemilihan kepala daerah yang diikuti lebih dari satu pasangan calon. Namun, dalam putusannya, MK menyatakan bahwa argumentasi yang diajukan tidak memiliki dasar yang jelas dan memadai.

Saldi menyebutkan bahwa permohonan ini tidak secara jelas menguraikan konflik konstitusional antara pasal yang diuji dengan UUD NRI 1945.

"Tidak pula diuraikan pertentangan antara norma-norma dimaksud dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dalil para Pemohon yang demikian tidak memiliki landasan argumentasi dalam posita," tambah Saldi.

Selain Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3), para Pemohon juga menuntut perubahan pada Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam UU Pilkada.

Namun, Mahkamah menilai permohonan ini tidak relevan, mengingat pasal tersebut telah diputuskan dalam perkara sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, yang menolak kekuatan hukum Pasal 54C ayat (2) secara bersyarat.

Sebagai tindak lanjut, MK menyatakan bahwa Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada telah kehilangan objek. "Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 harus pula dinyatakan telah kehilangan objek," tegas Saldi.

Seiring dengan itu, MK juga memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) diulang paling lama satu tahun kotak kosong pada pilkada calon tunggal dinyatakan meneng.

Selain itu, MK juga menyatakan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan ulang dimaksud, memegang masa jabatan sampai dilantik kepala dan wakil daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu lima tahun sejak pelantikan.

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Ketentuan tersebut merupakan pemaknaan baru MK terhadap Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Permohonan uji materi tersebut disampaikan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya. Salah satu pokok permohonan para pemohon terkait dengan kejelasan frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada.

Pertimbangan MK adalah Pasal 54D UU Pilkada mengatur soal tindak lanjut hasil pilkada dengan satu pasangan calon atau dikenal juga dengan istilah pilkada calon tunggal.

Pasal 54D ayat (1) mengamanatkan, KPU menetapkan pasangan terpilih pada pilkada calon tunggal jika memperoleh suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Apabila perolehan suara pasangan calon tunggal kurang dari syarat itu, pasangan calon tersebut boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya, sebagaimana diatur Pasal 54D ayat (2).

Sementara itu, Pasal 54D ayat (3) mengatur bahwa pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan-undang-undang. Hal inilah yang dipersoalkan oleh para pemohon yang dinilai karena tidak memiliki kepastian hukum yang adil.

MK mengatakan, desain waktu pemilihan berikutnya yang diatur dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada dirumuskan oleh DPR dan pemerintah bukan dalam model desain pilkada serentak secara nasional, seperti yang diterapkan pada Pilkada 2024 ini. Oleh karena itu, di samping memuat frasa "pemilihan berikutnya", pasal itu juga memuat "tahun berikutnya".

Menurut MK, kedua frasa tersebut harus dimaknai dengan tidak melepaskan hakikat keserentakan penyelenggaraan pilkada dan tidak diperbolehkan penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah menjabat terlalu lama.

Atas dasar itu, menurut MK, pemaknaan frasa "pemilihan berikutnya" dan "tahun berikutnya" dalam norma Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada menjadi "pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama satu tahun sejak

pemungutan suara 27 November 2024".

Meskipun demikian, Mahkamah berpesan, seharusnya KPU selaku penyelenggara pilkada berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

"Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat dalam periode masa jabatan sejak pelantikan," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan MK.

Lebih lanjut, demi menjaga model keserentakan pilkada secara nasional, MK mengatakan bahwa kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih karena keharusan dilakukan pilkada ulang harus menerima masa jabatannya kurang dari lima tahun.

"Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak akan mencapai lima tahun merupakan konsekuensi logis adanya 'pemilihan berikutnya' dimaksud," kata Saldi.

Di samping itu, MK juga mengingatkan bahwa perlu pula dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan lima tahun. Misalnya, dengan pemberian kompensasi.

Pemberian kompensasi bisa dengan ketentuan Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015, yakni kepala dan wakil kepala daerah yang tidak sampai satu periode diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

"Atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain," imbuh Saldi.

Desain Berubah Pemilu Mendatang

Di sisi lain, MK memutuskan mengubah desain surat pilkada dengan calon tunggal menjadi model plebisit dengan keterangan pilihan 'setuju' dan 'tidak setuju'. Putusan ini mulai pada Pilkada 2029.

Sementara untuk Pilkada 2024 dengan calon tunggal tetap berlaku desain surat suara terdiri dari kolom yang berisikan gambar pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar.

MK memutuskan mengubah desain surat suara pilkada dengan calon tunggal dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Dalam putusan perkara nomor 126/PUU-XXII/2024, majelis hakim MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas uji materi Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua

MK Suhartoyo di ruang sidang.

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya. Salah satu pokok permohonan para pemohon berkaitan dengan desain surat suara dalam Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada.

MK menilai dalil permohonan para pemohon terkait dengan desain surat suara tersebut beralasan menurut hukum sebagian. Karena itu, MK menyatakan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada, inkonstitusional bersyarat.

MK menilai keterangan dalam surat suara yang digunakan pada pilkada calon tunggal saat ini, tidak utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan. Pasalnya, keterangan tersebut tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan.

Menurut MK, narasi keterangan tersebut dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca, mengingat tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju terhadap calon tunggal.

MK berpendapat bahwa kesalahpahaman akibat ketiadaan informasi atau penjelasan yang utuh dalam keterangan yang dimuat pada desain surat suara untuk pilkada calon tunggal secara langsung akan berdampak pada para pemilih dalam mengambil keputusan.

"Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam memilih. Dalam hal ini, yang lebih diuntungkan adalah pilihan yang lebih banyak memuat informasi, seperti pilihan kolom yang memuat foto pasangan calon, lengkap dengan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga cenderung lebih menarik para pemilih," jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Lebih lanjut, MK menilai desain surat suara pilkada calon tunggal yang dipakai saat ini tidak memberikan keseimbangan dalam pilkada yang demokratis dan jauh dari asas-asas pemilu yang diamanatkan UUD 1945.

Karena itu, MK memutuskan agar pilkada calon tunggal menggunakan model surat suara plebisit, yakni model yang meminta para pemilih untuk menentukan "setuju" atau "tidak setuju" dengan calon tunggal.

"Pilihan tersebut masih tetap dapat menyisakan persoalan karena terdapat pemilih yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan baca-tulis. Oleh karena itu, MK berpesan agar KPU menyosialisasikan secara intensif makna kata 'setuju' atau 'tidak setuju' dalam surat suara pilkada calon tunggal," imbuh Saldi.

MK juga memastikan bahwa putusan MK soal desain surat suara tersebut baru mulai berlaku pada Pilkada 2029. Pasalnya, Pilkada 2024 telah memasuki tahap menjelang pemungutan suara dan tahapan pencetakan surat suara telah dilakukan. (din,tar,rls,ant/dya)



Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi-komisi terkait Rancangan Perda APBD 2025

DPRD Jatim Tekankan Anggaran untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna untuk membahas laporan komisi-komisi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (14/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menyatakan pembahasan APBD 2025 sangat penting, karena menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

"Fokus utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur. Kami juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat," ungkap Deni Wicaksono.

Menurut Deni, pihaknya juga tengah mengevaluasi sumber-sumber pendapatan daerah. "Selain menargetkan sumber-sumber pendapatan baru, kami juga tengah mengevaluasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini tidak efektif," ujarnya.

Deni juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan daerah menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar Rp12,678 triliun pada 2025.

Target ini turun Rp4,584 triliun dibandingkan target PAD pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp17,262 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).



Rapat paripurna untuk membahas laporan komisi-komisi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (14/11/2024).

"Anggaran belanja untuk Pendapatan Transfer dan pendapatan lain yang sah pada Rancangan APBD 2025 masih sesuai usulan awal tanpa koreksi berarti," ujar juru bicara Komisi C, Hartono.

Menurutnya, BUMD harus menjadi penggerak utama ekonomi daerah dan lebih sinergis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dengan demikian, PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp475,821 miliar dari usulan awal Rp469,641 miliar," paparnya.

Turunkan Angka Pengangguran

Sementara itu, Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat) DPRD Jawa Timur mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) karena jumlahnya yang dianggap cukup tinggi.

"Dalam rangka menurunkan TPT dimaksud, maka kebijakan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus diarahkan pada penurunan TPT," kata juru bicara Komisi E, Jairo Irawan.

Menurutnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnakertrans mengalami penurunan TPT dan pada Februari 2024 TPT Provinsi Jawa Timur 3,74 persen atau 900.000 jiwa dari angkatan kerja yang berjumlah 24.140.000.

"Pada Tahun Anggaran 2025,

kegiatan pelatihan kerja sebagai program prioritas untuk penurunan TPT justru mengalami pengurangan pagu anggaran dan target pesertanya, tetapi untuk pagu setiap satu orang peserta pelatihan kerja semakin besar jika dibandingkan dengan tahun 2024," ujarnya.

Pada 2024, pagu pelatihan kerja sebesar Rp72.496.759.800 dengan target peserta 10.376 orang yakni artinya setiap satu orang peserta pagunya sebesar Rp6.986.966.

Pada 2025, pagu pelatihan kerja sebesar Rp58.000.000.000 dengan target peserta 6.452 orang yang artinya setiap satu orang peserta pagunya sebesar Rp8.989.460.

"Hal ini berarti terdapat selisih Rp2.002.494 untuk pagu pelatihan kerja setiap satu orang peserta pelatihan kerja antara tahun 2024 dan 2025," ujar Jairo yang juga Wakil Ketua Komisi E.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi E merekomendasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah target peserta pelatihan kerja dengan besaran pagu anggaran untuk setiap satu orang peserta sama dengan tahun 2024.

Sedangkan untuk masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkawinan anak cukup tinggi di Jawa Timur sehingga juga perlu mendapat perhatian

Komisi E DPRD Jatim.

Oleh karena itu, lanjut Jairo, Komisi E mendukung segala program dan kegiatan untuk tujuan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perkawinan anak.

"Dalam rangka meningkatkan sarana prasarana, penguatan kebijakan, dan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak, Komisi E merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan

tambahan alokasi anggaran kepada DP3AK sebesar Rp3.801.260.000," tutur politisi Golkar ini.

Sementara itu, sebagai dampak penurunan pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Komisi E menemukan bahwa hampir semua Mitra Kerja Komisi E mengalami penurunan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Lanjut Jairo, hal ini menjadi perhatian Komisi E selama pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 agar tidak berdampak juga terhadap penurunan capaian kinerja Mitra Komisi E sesuai dengan target Pembangunan dalam RKPDP Tahun 2025. (Adv,Pra/Dya)

“

Fokus utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur. Kami juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,"

Deni Wicaksono
Wakil Ketua DPRD Jatim

